

RUMUSAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Renja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Renja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Amiin.

Benteng, Agustus 2023

KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, MM.Pub

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700726 199101 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu dan capaian Renstra-PD	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	39
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	51
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	55
3.3. Program dan Kegiatan	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	68
BAB V PENUTUP	83



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD Dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun Berjalan.....	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023	28
Tabel 2.3	Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023	40
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024	50
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPBD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	58
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab X menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dalam pasal 273 ayat (2) disebutkan bahwa Renstra-PD dirumuskan kedalam rancangan renja kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun. Dokumen Renja-PD mempunyai peranan yang strategis, karena menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dalam prosesnya, penyusunan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dan merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai kedepan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana, berkewajiban juga menyusun rencana Kerja. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah kebijakan perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya dalam penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dituntut mampu menjawab perkembangan lingkungan kerja baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode tahun 2024 memuat program/kegiatan perencanaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi, pemanfaatan teknologi Informasi kebencanaan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek perlindungan masyarakat maupun peningkatan indeks intelektual manusia.

Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2024, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Reopublik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana



- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
38. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk menempatkan program Penganggulangan Bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap upaya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan.

➤ **Tujuan Internal:**

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
2. Menyediakan dokumen acuan bagi BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di BPBD Kepulauan Selayar dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan program dan kegiatan.

➤ **Tujuan Eksternal:**

1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berorientasi untuk Pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap bencana.
2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan bencana, baik dalam kondisi pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar memiliki *concern* yang besar terhadap upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Mensinergikan program-program dan kegiatan penanggulangan bencana dengan program-program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman resiko bencana, baik di SKPD lain, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran program penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. maka sistematika penyusunan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 meliputi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
BAB V PENUTUP



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, telah memenuhi target kinerja ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2023 adalah seperti tertuang pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023					
					Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	70.53							
						Persentase Capaian Kinerja Keuangan	88%							
1	05	01	2.01		A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen atau Laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang di selesaikan tepat waktu	100%							
		01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	44.44%
		01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40.00%



					SKPD	Dokumen RKA-SKPD								
		01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40.00%
		01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40.00%
		01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40.00%
		01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	40.00%
		01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	38.10%
1	05	01	2.02		B. Administrasi Keuangan	Persentase Dokumen atau Laporan Pengelolaan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%							
		01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19 Orang/bulan		19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	97.65%	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	100.00%
		01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen		-	-	-	-	-	-



		01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen		-	-	-	-	-	-
		01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	1 Dokumen		-	-	-	-	-	-
		01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	40.00%
		01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40.00%
		01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5 Laporan		-	-	-	-	-	-
		01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-
1	05	01	2.03		C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	100%							



		01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-
		01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-
		01	2.03	0003	Koordinasi dan penilaian Barang milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	5 Laporan		-	-	-	-	-	-
		01	2.03	0004	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang milik Daerah pada SKPD	5 Laporan		-	-	-	-	-	-
		01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan		-	-	-	-	-	-
		01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	99%	12 Laporan	16 Laporan	26.66%	
		01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen hasil Pemanfaatan Barang milik Daerah SKPD	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-
1	5	01	2.05		D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%							
		01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Displin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Displin Pegawai	5 Unit		-	-	-	-	-	-
		01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta	5 Paket		-	-	-	-	-	-



		01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket		-	-	-	-	-	-
		01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	99.85%	1 Paket	2 Paket	40.00%
		01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	50 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	95.28%	10 Dokumen	20 Dokumen	40.00%
		01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	5 Laporan		-	-	-	-	-	-
		01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	40.00%
		01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-
1	5	01	2.07		F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100%		-	-	-	-	-	-
		01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	5 Unit		-	-	-	-	-	-
		01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5 Unit		-	-	-	-	-	-
		01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	100 Unit		-	-	-	20 Unit	20 Unit	20.00%



		01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	45 Unit		4 Unit	4 Unit	100%	9 Unit	13 Unit	28.89%	
		01	2.07	0007	Pengadaan aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset Tetap Lainnya yang disediakan	5 Unit		-	-	-	-	-	-	-
		01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit		-	-	-	-	-	-	-
		01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit		-	-	-	-	-	-	-
		01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit		-	-	-	-	-	-	-
1	5	01	2.08		G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%								
		01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	40.00%	
		01	2.08	0002	penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrk	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrk yang disediakan	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	99.53%	1 Laporan	2 Laporan	40.00%	
		01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	99.55%	1 Laporan	2 Laporan	40.00%	
1	5	01	2.09		H. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%								



		01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit		1 Unit	1 Unit	99.98%	1 Unit	2 Unit	40.00%
		01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100 Unit		20 Unit	20 Unit	99.86%	20 Unit	40 Unit	40.00%
		01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	5 Unit		-	-	-	-	-	-
		01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	70 Unit		14 Unit	14 Unit	99.87%	12 Unit	28 Unit	40.00%
		01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	5 Unit		-	-	-	-	-	-
		01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	5 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	40.00%
		01	2.09	0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	5 Unit		-	-	-	-	-	-
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%		-	-	-	-	-	-
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%		-	-	-	-	-	-



						Persentase warga negara yang mendapatkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%							
1	05	03	2.01		A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%							
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sampai dengan	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1(satu) tahun	375 Orang		50 Orang	50 Orang	100%	65 Orang	115 Orang	30.67%
1	05	03	2.02		B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%							
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	13 Kawasan		1 Kawasan	1 Kawasan	100%	3 Kawasan	4 Kawasan	30.77%



1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	200 Orang		30 Orang	30 Orang	98.49%	35 Orang	45 Orang	22.50%
1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	1 Dokumen		-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	205 Orang		-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.02	0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang dilegalisasi	1 Dokumen		-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.02	0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga Yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga		-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas)	5 kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	2 Kegiatan	40.00%
1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen		-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	742 Unit		-	-	-	145 Unit	145 Unit	19.54%



1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	370 Orang	-	-	-	65 Orang	-	-
1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	5 Laporan	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.03		C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.03	0001	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis Prioritas	Jumlah laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah prioritas	5 Laporan	1 laporan	-	-	1 Laporan	-	-
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98.87%	1 Dokumen	2 Dokumen	40.00%
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	200 Orang	30 Orang	30 Orang	94.41%	30 Orang	60 Orang	30.00%



1	05	03	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi kedaruratan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.03	0008	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat kabupaten/kota	Jumlah aparatur SDM BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	2 Orang	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	200 orang	30 Orang	30 Orang	98%	35 Orang	65 Orang	32.50%
1	05	03	2.03	0010	Respon cepat Bencana Non Alam Epidemii/wabah Penyakit	Jumlah Dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan Investigasi KLB dan epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	99.86%	1 Laporan	2 Laporan	40.00%
1	05	03	2.04		D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100%						
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung penyelenggaraan Penanggulangan	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-



						Bencana di Daerah									
1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04	0003	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia	5 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20.00%	
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan hasil Binwas penyelenggaraan penanggulangan bencana	5 Laporan		-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04	0007	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana kabupaten/kota	Jumlah SDM Aparatur penanggulangan Bencana yang memiliki kompetensi	5 Orang		-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan teknis Pasca bencana kabupaten/kota	Jumlah aparatur BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi	5 Orang		-	-	-	-	-	-	-



1	05	03	2.04	0009	Penyusunan rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) Sub Urusan Bencana kabupaten/kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	5 Dokumen												
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi Penanganan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) kabupaten/kota yang di legalkan	5 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	99.86%	1 Kegiatan	2 Kegiatan	40.00%					
1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana kabupaten/kota meliputi lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi,	5 Lembaga												



						media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal								
1	05	03	2.04	0012	Fasilitas pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kabupaten/kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	5 Laporan		-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04	0013	Penyusunan kajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) kab/kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-



2.2. Analisis kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Tahun 2024, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Selayar berupa dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ditetapkan. Berikut SPM dan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar :

1. Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
2. Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan salah satu OPD pengampu SPM yaitu Trantibumlinmas yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dasar pada sub urusan bencana berkomitmen untuk melakukan percepatan dalam

pemenuhan dan penerapan SPM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada SPM pada pelayanan sub urusan bencana telah mencapai target setiap tahunnya, namun pencapaian target disini dapat diartikan bahwa target yang dicapai disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diberikan, namun untuk lebih optimalnya pencapaian target program masih sangat membutuhkan alokasi anggaran yang mencukupi untuk memenuhi pelayanan dasar SPM. Oleh karena itu agar komitmen ini dapat berjalan dengan baik dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas dari seluruh *stakeholders* untuk mendukung pencapaian kinerja pelayanan SPM.

Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPBD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks Reformasi Birokrasi			27,36	32,30	34,24	36,18	27,36	-	34,24	36,18	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah			76,9	77	77,5	78	76,9	-	77,5	78	
1.	Nilai SAKIP Perangkat daerah			60,00 B	65,00 B	70,00 BB	75,00 BB	39,95 C	-	70,00 B	75,00 BB	
2.	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)			Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	-	Sesuai	Sesuai	
4.	Persentase layanan kebencanaan pada masyarakat (pra bencana, tanggap bencana)			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	



5.	Persentase layanan pengurangan risiko bencana pada masyarakat			100%	100%	100%	100%	99,61%	-	100%	100%	
6.	Persentase korban bencana yang tertangani			100%	100%	100%	100%	98%	-	100%	100%	
7.	Persentase penanganan pascabencana			100%	100%	100%	100%	99,95%	-	100%	100%	
8.		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
9.		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
10.		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
11.			Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
12.			Persentase warga Negara									



			yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
13.			Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

Pada tabel. 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk realisasi capaian tahun 2023 belum terpenuhi dikarenakan kegiatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih sementara berjalan.



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan Hal Kritis Yang Terkait dengan Pelayanan OPD

Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara geografis terletak di ujung selatan jazirah Sulawesi dan memanjang dari utara ke Selatan dan terdiri dari gugusan pulau-pulau (132 pulau), luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km², terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03 km² dan luas wilayah laut adalah 9.146,66 km², dengan panjang garis pantai yaitu 670 km.

Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi terhadap bencana alam berupa tsunami, kecelakaan laut, angin kencang, abrasi pantai dan banjir. Hampir semua Desa dan Kelurahan sepanjang pantai barat dan timur serta 26 pulau berpenghuni pada 5 (lima) kecamatan yang berada di kepulauan, rawan terhadap bencana alam laut, berupa gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kejadian tersebut dengan membangun infrastruktur yang tahan terhadap gangguan tersebut dan membuat tanggul hijau (penanaman Mangrove), pembangunan umum dan infrastruktur yang dibutuhkan dengan ketentuan teknis yang ramah gelombang pasang dilengkapi bangunan/tanaman penahan tsunami, jalan dan bangunan penyelamat.

Ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang menuntut adanya penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal ini untuk mencegah dampak dari pemanfaatan ruang yang tidak tepat pada daerah tertentu misalnya pemanfaatan kawasan longsor, pembangunan di daerah penyanggah/*buffer zone* (sempadan sungai, hutan bakau, dll). Dampak Pemanfaatan Ruang yang tidak tepat antara lain berakibat pada hilangnya fungsi lindung hidrolis

kawasan, menurunnya kemampuan peresapan air, ancaman banjir terhadap bangunan di bantaran sungai, hilangnya daerah *buffer*/penyanggah, dll.

Salah satu bentuk sinergitas program antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan pembangunan mitigasi bencana non fisik yang dibuat dalam bentuk penyusunan dokumen yang dinamakan Dokumen Kajian Risiko Bencana. Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menganalisa tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah. Penyusunan kajian risiko bencana ini dapat membantu dalam mendukung analisa kejadian bencana, penentuan upaya penanggulangan bencana serta sebagai acuan dalam perencanaan daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga integrasi dapat berjalan optimal.

b. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya telah menimbulkan perubahan mendasar terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain :

1. Adanya payung hukum, mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana;
2. Perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan;
3. Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan;
4. Penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
5. Konsekuensi logis untuk membentuk kelembagaan yang kuat dan semesta;

6. Mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat, serta keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggara penanggulangan bencana.

Salah satu yang dirumuskan berdasarkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana adalah adanya sistem penanggulangan bencana yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain :

1. *Komponen legislasi*, mencakup dasar-dasar kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana beserta turunan-turunannya dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota.
2. *Komponen kelembagaan*, terkait dengan kedudukan, struktur, tugas pokok dan kewenangan badan penanggulangan dari tingkat nasional, sampai dengan kabupaten/kota.
3. *Komponen perencanaan*, terkait dengan program penanggulangan bencana dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu “mainstream” dalam perencanaan pembangunan. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana sebagai perspektif dalam perencanaan.
4. *Komponen pendanaan*, terkait dengan penganggaran dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana, sumber dana bisa berasal dari berbagai sumber, dengan tetap memegang prinsip untuk tidak mempergunakan dana-dana yang bisa menimbulkan kerentanan baru, misalnya dana pinjaman luar negeri, dan dari perusahaan yang mempunyai kontribusi merusak lingkungan. Di sisi lain pendanaan dan program ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
5. *Pengembangan kapasitas*, disemua komponen penyelenggara penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam semua fase baik pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana merupakan “urusan bersama”, semua sektor/lini, dan tiap-tiap komponen dalam system penanggulangan bencana memiliki kontribusi yang sama pentingnya

terhadap kesuksesan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota semakin memperjelas tugas, pokok, dan fungsi BPBD.

Masalah yang ditemui sampai saat ini adalah belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multi dimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dan manajemen kebencanaan belum berfungsi secara optimal sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan penanganan bencana kepada masyarakat.

c. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang serta dengan memperhitungkan faktor-faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta stakeholder lainnya, maka dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 dicanangkan Visi Kabupaten Kepulauan Selayar **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**, dengan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan;
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung/menyukseskan Visi/Misi Bupati tersebut khususnya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, dituangkan dalam program kegiatan lima tahun ke depan, namun demikian pelaksanaannya masih terkendala pada:

1. Keterbatasan SDM Aparatur (baik dari segi kualitas maupun kuantitas)
2. Keterbatasan dari segi anggaran
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penanganan kebencanaan.
4. Keterbatasan SDM Masyarakat (relawan bencana) dalam hal pengetahuan penanganan kebencanaan.

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mewujudkan misi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, tercantum pada Misi 1 dan Misi 2 yaitu

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan yang mengandung makna tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang mengandung makna tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

 Tantangan

Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan penanggulangan bencana antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana.

Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan dan keseragaman data dan informasi serta tingkat risiko bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mengurangi risiko-risiko tersebut melalui program kegiatan akan terfokus dan sesuai dengan prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya serta anggaran yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

- a. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar dikategorikan tinggi sesuai data Indeks Risiko Bencana Indonesia.
- b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah saja;
- c. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- d. koordinasi, kolaborasi dan sinergitas antar *stakeholders* belum optimal sehingga budaya akan sadar bencana masih belum terlaksana dengan baik;
- e. perkembangan teknologi informasi yang pesat di era digital ini yang menuntut penyebaran informasi bencana dan pelaporan informasi kebencanaan sudah menggunakan aplikasi berbasis elektronik sehingga sumber daya manusia kebencanaan sudah harus mampu memanfaatkan teknologi informasi yang mumpuni.

- f. Belum optimalnya kualitas sumber daya pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
- g. Sumberdaya manusia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal pemberian pendidikan dan pelatihan berbasis kebencanaan masih terbatas sehingga kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sangat luas.

Peluang

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk dapat dijadikan program yang penting dan prioritas, seperti berikut ini :

1. Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya termasuk peraturan daerah, peluang untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat luas, tidak hanya terbatas pada pemerintah, namun juga dari masyarakat dan kalangan dunia usaha;
2. Adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 beserta peraturan pemerintah pendukungnya berdampak pada penguatan peran BPBD Kabupaten/Kota;
3. Dibangunnya system penanggulangan bencana secara nasional memungkinkan seluruh BPBD mempunyai kompetensi dan kapasitas yang sama dan sesuai standar kualifikasi;
4. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui kementerian/lembaga teknis;
5. Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan peluang belanja (Dana Alokasi Khusus Bencana) oleh Pemerintah Pusat;
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan lain-lain.

7. Penyusunan aplikasi system informasi untuk menyimpan dan mengelola data kebencanaan baik kerawanan, kerentanan, kapasitas penanggulangan bencana secara baik;
8. Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli bencana dan diuji melalui gladi lapang/gladi kesiapsiagaan bencana secara periodik;
9. Perlunya pengarusutamaan paradigma pengurangan risiko bencana kepada pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana;
10. Bimbingan dan pelatihan penyusunan SOP serta indikator kinerja dalam pengelolaan penanggulangan bencana.

e. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Penguatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui pengurangan risiko bencana dan peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Optimalisasi pelayanan informasi rawan bencana secara terintegrasi, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. Peningkatan peran dan fungsi lembaga terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Aktualisasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana secara menyeluruh.
- e. Peningkatan kapasitas SDM Kebencanaan sebagai aset/modal berharga yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui peningkatan kompetensinya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

- **Proses yang dilakukan dalam membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan**

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam prioritas penanganan bencana meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 3.251.708.983,-, sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 2.459.419.600,-
2. Program Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran pada rancangan awal RKPD sebesar Rp. 1.110.774.090,-, sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 450.000.000,-

- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ingin dicapai :
Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana yang ingin dicapai :
Persentase warga negara yang mendapat layanan kebencanaan (Pra Bencana, Tanggap darurat, dan pascabencana).

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 tertuang dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lo kasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp.000)	Program/Kegiatan	Lo kasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					4.362.483.073,-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					2.909.419.600,-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					3.251.708.983,-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					2.459.419.600,-
	A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.000.000,-	A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.832.000,-
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	4.440.000,-	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	3.950.000,-
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 Dokumen	2.200.000,-	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 Dokumen	2.936.000,-

				dokumen RKA - SKPD						penyusunan dokumen RKA - SKPD					
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	2.200.000,-			3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	2.936.000,-
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	2.200.000,-			4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	2.936.000,-
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	2.200.000,-			5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	2.936.000,-
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian	1 Laporan	5.000.000,-			6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 Laporan	3.750.000,-

				kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	5.760.000,-			7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	8.388.000,-	
		B Administrasi Keuangan					2.021.587.978,-			B Administrasi Keuangan					1.742.869.600,-	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Selayar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.006.587.978,-			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Selayar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.727.219.600,-	
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.000.000,-			2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	
		3	Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000,-			2	Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	11.342.000,-	
		4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.000.000,-			3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.308.000,-	



		Pemeriksaan	ar						ar					
		C. Administrasi Barang Milik Daerah				10.000.000,-			C. Administrasi Barang Milik Daerah				4.000.000,-	
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.000.000,-			1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.000.000,-
		D. Administrasi Kepegawaian				25.000.000,-			D. Administrasi Kepegawaian Perangkat					-
	1.	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Kep. Selayar	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	25.000.000,-			1	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Kep. Selayar	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	-
		E. Administrasi Umum Perangkat				340.000.000,-			E. Administrasi Umum Perangkat Daerah					113.085.000,-
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	10.000.000,-			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	4.085.000,-
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang di sediakan	20 Paket	5.000.000,-			2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang di sediakan	20 Paket	-
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	10.000.000,-			3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	4.000.000,-

	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kab. Kep. Selay ar	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	10 Dokumen	10.000.000,-		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kab. Kep. Selay ar	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	1 Dokumen	5.000.000,-	
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Selay ar	Jumlah Laporan Penyelengaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	305.000.000,-		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Selay ar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000,-	
	F. Pengadaan Barang Milik Daerah					37.500.000,-		F. Pengadaan Barang Milik Daerah					20.600.000,-	
	1	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kep. Selay ar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	37.500.000,-		1	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kep. Selay ar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	-	
	2	Pengadaan Mebel	Kab. Kep. Selay ar	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	-		2	Pengadaan Mebel	Kab. Kep. Selay ar	Jumlah paket mebel yang disediakan	20 Unit	9.600.000,-	
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Selay ar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	-		3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Selay ar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	11.000.000,-	
	G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					532,003,800		G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					421,592,000	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Selay ar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.500.000,-		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kep. Selay ar	Jumlah Laporan Penyediaan	1 Laporan	-	

			ar					ar	Jasa Surat Menyurat						
		2	penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrk	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrk yang disediakan	1 Laporan	124.503.800,-		2	penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrk	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrk yang disediakan	1 Laporan	53.940.000,-	
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	400.000.000,-		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	367.652.000,-	
		H. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					261.617.205,-		H. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					129.441.000,-	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	41.617.205,-		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	38.630.000,-	



		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 Unit	185.000.000,-		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 Unit	70.260.000,-	
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit	20.000.000,-		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	10.530.000,-	
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	15.000.000,-		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	10.021.000,-	
PROGRAM PENANGGULANGAN							1.110.774.090,-		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					450.000.000,-	
	A	Pelayanan Informasi Rawan					44.415.600,-		A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana				100.000.000,-	
		1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Kep. Selayar	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentandi kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat	75 Orang	44.415.600,-		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Kep. Selayar	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentandi kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat	100 Orang	100.000.000,-	

	C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				286.215.600,-	C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				115.000.000,-	
	1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	40 Orang	45.000.000,-	1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	30 Orang	25.000.000,-	
	2	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan keadaan darurat kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah aparatur SDM BPBD Kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	2 Orang	36.215.600,-	2	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan keadaan darurat kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah aparatur SDM BPBD Kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	2 Orang	0,-	
	3	Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen SK Penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kajian cepat	1 Dokumen	0,-	3	Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen SK Penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kajian cepat	1 Dokumen	50.000.000,-	
	3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik	40 Orang	95.000.000,-	3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi	30 Orang	35.000.000,-	



		Kota		penyelamatan dan evakuasi korban bencana				Bencana Kabupaten / Kota		logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	110.000.000,-	4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	5.000.000,-	
	D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					418.942.890,-		D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				125.000.000,-	
	1	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah data dan informasi kebencanaan	1 Dokumen	55.000.000,-	1	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Kep. Selayar	Jumlah data dan informasi kebencanaan	1 Dokumen	-	
	2	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Penyelesaian kegiatan Pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana (R3P) kabupaten/kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	363.942.890,-	2	Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Kab. Kep. Selayar	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P)	1 Kegiatan	125.000.000,-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat untuk program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak ada usulan program baik dari kelompok masyarakat, LSM dan dari pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

Tabel. 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan pada tahun 2023 seperti pokok-pokok pikiran dan anggota DPRD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak ada.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*** dengan misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan dan Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD). Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah ***“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Dijabarkan dalam 7 prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah *Major Project*, yakni pengembangan

kawasan industri prioritas dan *smelter*, pengelolaan terpadu UMKM, *food estate*, destinasi pariwisata prioritas.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselenggarakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing;

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan Agenda Pembangunan pada point 6 (enam) yaitu ***“Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim”***.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta penetaingkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta
- c. Pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan kedalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan
 - 4) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu :

- 1) Penanggulangan bencana; dan
 - 2) Peningkatan ketahanan iklim.
- c. Pembangunan rendah karbon, dan kegiatan prioritas, yaitu :
- 1) Pembangunan energi kelanjutan;
 - 2) Pemulihan lahan berkelanjutan; dan
 - 3) Pengembangan industri hijau.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang menangani urusan kebencanaan maka sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. Selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi ***“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”*** secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;



4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

Visi dan misi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana di padukan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan visi instansi yaitu: ***“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”***.

Dengan mengacu pada visi yang telah ditetapkan, maka misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif;
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas an aksesibel;
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif;
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif, dan berkarakter;
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat daerah. Dalam rangka

penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan;
- b. Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah.

Tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya nilai SAKIP;
- b. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan laporan keuangan pemerintah perangkat daerah sesuai SAP;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Kegiatan adalah media untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang akan dilakukan untuk menilai tingkat capaian keberhasilan sasaran dan tujuan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tugas dan fungsinya membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, pada dasarnya program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai komando, koordinasi dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelayanan penanggulangan bencana dapat diatasi sesuai dengan dukungan sumberdaya yang tersedia dan memadai.

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada tabel 3.1.



Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIAT AN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATA- TAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian Kinerja		100%	3.264.490.072,-			100%	3.695.252.079,-
						Persentase Capaian Kinerja Keuangan		100%			100%		
1	5	01	2.01		A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun		100%	33.000.000,-			100%	36.300.000,-
1	5	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Kepulau nSelayar	2 Dokumen	6.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	6.600.000,-

1	5	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	3.500.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.850.000,-
1	5	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	3.500.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.850.000,-
1	5	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	3.500.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.850.000,-
1	5	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	3.500.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	3.850.000,-



1	5	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	6.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Laporan	6.600.000,-
1	5	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Kepulauan Selayar	4 Laporan	7.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	4 Laporan	7.700.000,-
1	5	01	2.02		B. Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan Administrasi keuangan perangkat daerah		100%	1.802.714.072,-		100%	1.976.862.879,-
1	5	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Selayar	20 Orang/Bulan	1.781.714.072,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	19 Orang/Bulan	1.953.762.879,-
1	5	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	15.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Laporan	16.500.000,-
1	5	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	6.000.000,-	Dana Transfer Umum,	1 Dokumen	6.600.000,-

1	5	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Paket	15.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Paket	16.500.000,-
1	5	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	13.500.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	14.850.000,-
1	5	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 laporan	541.532.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 laporan	595.685.200,-
1	5	01	2.07		F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	90.000.000,-		100%	99.000.000,-
1	5	01	2.07	0005	1 Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	20 Unit	20.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	20 Unit	22.000.000,-
1	5	01	2.07	0006	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	5 Unit	70.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	9 Unit	77.000.000,-
1	5	01	2.08		G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	363.038.000,-		100%	503.800.000,-



1	5	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	8.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Laporan	8.800.000,-
1	5	01	2.08	0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	150.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Laporan	165.000.000,-
1	5	01	2.08	0004	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	205.038.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Laporan	330.000.000,-
1	5	01	2.09		H. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	335.731.000,-		100%	375.254.000,-
1	5	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	40.950.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Unit	45.045.000,-
1	5	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Kepulauan Selayar	20 Unit	194.690.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	20 Unit	220.000.000,-

					Lapangan								
1	5	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Kepulauan Selayar	20 unit	17.190.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		20 unit	18.909.000,-
1	5	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	82.901.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Unit	91.300.000,-
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100%	1.097.993.000,-			100%	1.207.792.600,-
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%						
					Persentase warga negara yang mendapatkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%						
1	05	03	2.01		A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100%	0,-			100%	0,-



1	05	03	2.01	0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Kepulauan Selayar	100 Orang		Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	100 Orang	0,-
1	05	03	2.02		B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	415.724.000,-		100%	457.296.400,-
1	05	03	2.02	0006	1 Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kab. Kepulauan Selayar	2 Kawasan	43.665.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	2 Kawasan	48.031.500,-
1	05	03	2.02	0008	2 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kab. Kepulauan Selayar	30 Orang	123.181.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	30 Orang	135.499.100,-
1	05	03	2.02	0013	3 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang	Kab. Kepulauan Selayar	1 Kegiatan	164.950.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	181.445.000,-

						tertangani							
1	05	03	2.02	0016	4 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab. Kepulauan Selayar	2 Kawasan	83.928.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		2 Kawasan	92.320.000,-
1	05	03	2.02	0017	5 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	0,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Laporan	0,-
1	05	03	2.03		C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%	298.326.000,-			100%	328.159.000,-
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	114.151.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	125.566.100,-

1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	Kab. Kepulauan Selayar	30 Orang	92.030.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	30 Orang	101.233.000.000,-
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Kepulauan Selayar	30 Orang	72.145.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	30 Orang	72.359.900,-
1	05	03	2.03	0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	20.000.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Laporan	22.000.000,-
1	05	03	2.04		D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan penataan sistem dasar penanggulangan bencana		100%	383.943.000,-			422.337.200,-
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	-
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kabupaten/kota yang dilegalikan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Kegiatan	383.943.000,-	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Kegiatan	422.337.200,-
JUMLAH									4.362.483.072,-			4.903.044.679,-



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran 2024 merencanakan Program Kerja (Renja) sebanyak 2 (dua) Program dengan 11 (sebelas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 2.909.419.600,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah)** yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 3) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel;
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota

- 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota;
- 2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (per jenis Bencana).

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana

- 1) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- 2) Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/kota;
- 3) Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 4) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- 1) Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/kota;
- 2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota;

- 3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota;
- 4) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- 1) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
- 2) Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.

Adapun Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN 2024			PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024			ALA- SAN PERU BAHAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	BERTAMBAH (Rp.)	BERKURANG (Rp.)	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Capaian Kinerja Persentase Capaian kinerja Keuangan		100%	3.264.490.072,-	164.002.000,-	969.072.472,-	2.459.419.600,-	
1	5	01	2.01		A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun		100%	33.000.000,-	1.388.000,-	6.556.000,-	27.83.000,-	
1	5	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Kepulau an Selayar	2 Dokumen	6.000.000,-	-	2.050.000,-	3.950.000,-	
1	5	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	Kab. Kepulau an Selayar	1 Dokumen	3.500.000,-	-	564.000,-	2.936.000,-	

1	5	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	3.500.000,-	-	564.000,-	2.936.000,-
1	5	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	3.500.000,-	-	564.000,-	2.936.000,-
1	5	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA -SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	3.500.000,-	-	564.000,-	2.936.000,-
1	5	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	6.000.000,-	-	2.250.000,-	3.750.000,-
1	5	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Kepulauan Selayar	4 Laporan	7.000.000,-	1.388.000,-	-	8.388.000,-
1	5	01	2.02		B. Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan Administrasi keuangan perangkat daerah		100%	1.802.714.072,-	-	59.844.472,-	1.742.869.600,-
1	5	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Selayar	20 Orang/bulan	1.781.714.072,-	-	54.494.472,-	1.727.219.600,-



1	5	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	-	-	-	-	
1	5	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	12 Dokumen	-	-	-	-	
1	5	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	-	-	-	-	
1	5	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	15.000.000,-	-	3.658.000,-	11.342.000,-	
1	5	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	6.000.000,-	-	1.692.000,-	4.308.000,-	
1	5	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	-	-	-	-	
1	5	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	-	-	-	-	
1	5	01	2.03		C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah		100%	10.000.000,-	-	6.000.000,-	4.000.000,-	



1	5	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	-	-	-	-	
1	5	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	-	-	-	-	
1	5	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	-	-	-	-	
1	5	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	12 Laporan	10.000.000,-	-	6.000.000,-	4.000.000,-	
1	5	01	2.05		D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	35.000.000,-	-	35.000.000,-	-	
1	5	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Displin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Displin Pegawai	Kab. Kepulauan Selayar	5 Unit	-	-	-	-	
1	5	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kepulauan Selayar	19 Paket	-	-	-	-	
1	5	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	-	-	-	-	
1	5	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kepulauan Selayar	5 Orang	35.000.000,-	-	35.000.000,-	-	
1	5	01	2.06		E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	595.007.000,-	-	481.922.000,-	113.085.000,-	

1	5	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Paket	24.975.000,-	-	20.890.000,-	4.085.000,-
1	5	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	10 Paket	-	-	-	-
1	5	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	6 Paket	-	-	-	-
1	5	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	20 Paket	-	-	-	-
1	5	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Paket	15.000.000,-	-	11.000.000,-	4.000.000,-
1	5	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	13.500.000,-	-	8.500.000,-	5.000.000,-
1	5	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	-	-	-	-
1	5	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	541.532.000,-	-	441.532.000,-	100.000.000,-
1	5	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	-	-	-	-
1	5	01	2.07		F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	90.000.000,-	-	69.400.000,-	20.600.000,-



1	5	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	-	-	-	-	
1	5	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	2 Unit	-	-	-	-	
1	5	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	20 Unit	20.000.000,-	-	10.400.000,-	9.600.000,-	
1	5	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	5 Unit	70.000.000,-	-	59.000.000,-	11.000.000,-	
1	5	01	2.07	0007	Pengadaan aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset Tetap Lainnya yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	4 Unit	-	-	-	-	
1	5	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	-	-	-	-	
1	5	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	-	-	-	-	
1	5	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	-	-	-	-	
1	5	01	2.08		G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	363.038.000,-	162.614.000,-	104.060.000,-	421.592.000,-	
1	5	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	8.000.000,-	-	8.000.000,-	-	



1	5	01	2.08	0002	penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrk	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrk yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	150.000.000,-	-	96.060.000,-	53.940.000,-
1	5	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	205.038.000,-	162.614.000,-	-	367.652.000,-
1	5	01	2.09		H. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	335.731.000,-	-	206.290.000,-	129.441.000,-
1	5	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	40.950.000,-	-	2.320.000,-	38.630.000,-
1	5	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Kepulauan Selayar	20 Unit	194.690.000,-	-	124.430.000,-	70.260.000,-
1	5	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Kepulauan Selayar	20 Unit	17.190.000,-	-	6.660.000,-	10.530.000,-
1	5	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	-	-	-	-
1	5	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	82.901.000,-	-	72.880.000,-	10.021.000,-
1	5	01	2.09	0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	-	-	-	-



1	5	01	2.09	0010	6 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	-	-	-	-	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase desa/kelurahan yang memperoleh layanan penanggulangan bencana		100%	1.097.993.000,-	100.000.000,-	489.050.000,-	450.000.000,-	
1	05	03	2.01		A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100%	-	100.000.000,-	-	100.000.000,-	
1	05	03	2.01	0001	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang dilegalisasi	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	-	-	-	-	
1	05	03	2.01	0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Kepulauan Selayar	100 Orang	-	100.000.000,-	-	100.000.000,-	
1	05	03	2.02		B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	415.724.000,-	-	305.724.000,-	110.000.000,-	
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam	Kab. Kepulauan Selayar	2 Kawasan	43.665.000,-	-	43.665.000,-	-	

1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Kepulauan Selayar	20 unit	-	-	-	-	
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab. Kepulauan Selayar	2 Kawasan	83.928.000,-	-	83.928.000,-	-	
1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah laporan layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	-	-	-	-	
1	05	03	2.03		C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%	298.326.000,-	-	183.326.000,-	115.000.000,-	
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	-	-	-	-	
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen SK penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	114.151.000,-	-	64.151.000,-	50.000.000,-	



1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	-	-	-	-	
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan hasil Binwas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	-	-	-	-	
1	03	03	2.04	0005	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Kegiatan	383.943.000,-	-	258.943.000,-	125.000.000,-	
JUMLAH									4.362.483.072,-	264.002.000,-	1.458.122.472,-	2.909.419.600,-	



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah kebijakan, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari visi dan misi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026.

Dengan melaksanakan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan manifestasi tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang menghubungkan antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan

pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
 - a) Melaksanakan penyusunan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya agar senantiasa bekerja bersama sesuai dengan standar operasional prosedur untuk menghasilkan formulasi kebijakan dalam penanggulangan bencana yang diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah dan aturan yang berlaku;
 - b) Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

1.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Kepala Daerah, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Akhir kata semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, Agustus 2023
KEPALA PELAKSANA BPBD,

Drs. AHMAD ALIEFYANTO, MM.Pub
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700726 199101 1 002

